

ANALISIS LAPORAN KAJIAN TIPIKASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN DI KAWASAN PEDESAAN KABUPATEN BEKASI

Erna Haryanti

haryanti_erna@yahoo.com

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan di Kabupaten Bekasi, bertujuan untuk mengetahui teranalisisnya potensi dan permasalahan pada setiap tipikasi masyarakat pedesaan dan teranalisisnya model/pola, bentuk dan pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk setiap tipikasi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bekasi, dan mengetahui perumusan konsep pemberdayaan masyarakat untuk setiap tipikasi masyarakat pedesaan Kabupaten Bekasi.

Metode kajian yang menggunakan metode deskriptif yaitu menggunakan dua jenis data, pertama adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para nara sumber terpilih (purposive sampling) yang berasal dari pemerintah dan tokoh masyarakat terkait informasi tentang kegiatan dan perilaku masyarakat di wilayahnya. Kedua adalah data sekunder berupa data kualitatif maupun kuantitatif terkait materi kajian yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen resmi yang telah maupun belum di publikasikan.

Hasil Penelitian ini yaitu agar Kabupaten Bekasi melakukan inovasi program pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan dan strategi program. Mengembangkan peran CSR (Corporate Social Responsibility) yang selama ini lebih banyak memiliki program-program charity, dengan lebih mengedepankan pengembangan maupun dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat. Melakukan kajian lanjutan mengenai tipologi masyarakat dengan faktor atau unsur-unsur lain yang belum tercantum dalam kajian ini, misalnya terhadap wilayah perkotaan dan industri.

Kata kunci : Tipikasi, Pedesaan, Inovasi, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah urban yang sangat berkembang dengan posisi strategisnya, kondisi ini tentunya diikuti pula dengan perubahan masyarakatnya. Suatu hal yang terlihat adalah terjadi perubahan karakter masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi menjadi sangat beragam. Di satu sisi karena berkembangnya industri membentuk karakter masyarakat industri dan diikuti pula dengan munculnya karakter masyarakat yang bersifat perdagangan dan jasa, di sisi lain masyarakat di luar industri masih bertahan dengan karakternya seperti masyarakat pertanian (baik lahan basah maupun lahan kering) dan karakter

Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)

masyarakat nelayan/pesisir. Secara umum hal ini dapat dilihat dengan adanya karakter masyarakat berciri perkotaan dan masyarakat berciri pedesaan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Perkembangan di Kabupaten Bekasi pada kenyataannya masih menyisakan angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di kawasan pedesaan, sehingga untuk menekannya perlu adanya berbagai intervensi salah satunya dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pemberdayaan masyarakat pendekatan utamanya adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek, tetapi merupakan subjek dari pembangunannya sendiri. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (*targeted*), harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat dan dengan pendekatan kelompok.

Memahami akan pendekatan utama dalam pemberdayaan masyarakat dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda tipikasinya (seperti masyarakat pertanian, masyarakat nelayan atau pesisir, masyarakat industri, masyarakat perdagangan dan jasa), maka program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bekasi seharusnya memperhatikan tipikasi masyarakat tersebut agar program-programnya dapat tepat sasaran dan tepat pendekatannya.

Tujuan Penelitian

Dalam kegiatan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi ini adalah untuk mengkaji tipe-tipe dan karakter masyarakat di kawasan pedesaan di Kabupaten Bekasi dan kajian model, pola dan bentuk pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan tipikasi masyarakat, sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi tepat sasaran dan tepat pendekatan. Adapun tujuannya adalah.

1. Mengetahui teranalisisnya potensi dan permasalahan pada setiap tipikasi masyarakat pedesaan dan teranalisisnya model/pola, bentuk dan pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk setiap tipikasi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bekasi
2. Mengetahui perumusan konsep pemberdayaan masyarakat untuk setiap tipikasi masyarakat pedesaan Kabupaten Bekasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Tipologi Masyarakat Desa/Pedesaan

Tipologi masyarakat desa/pedesaan dapat di tinjau dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian; Desa industri, dimana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut; dan Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha di bidang perikanan (pantai, laut dan darat).

Dari segi pola permukiman *Farm village type*, yaitu suatu desa yang didiami secara ber-sama dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut. *Nebulous farm village type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu

Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)

tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat bersama sawah ladang mereka. *Arranged isolated farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. *Pure isolated farm village type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing.

Dari segi perkembangan masyarakat yaitu Desa tradisional (pra desa), tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing. Desa swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi yang relatif statis tradisional. Desa swakarya (desa peralihan). Keadaan desa sudah mulai disentuh oleh pembaharuan. Desa swasembada. Masyarakat telah maju karena sudah mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah.

Pemberdayaan Masyarakat

Suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas harus dipahami bahwa masyarakat atau komunitas ditempatkan sebagai pihak yang akan menerima kekuatan/daya (*power*); dan jika itu sebuah program atau proyek, maka semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana program atau proyek diposisikan sebagai si Pemberdaya. Maka jelaslah, bahwa semua pihak yang bekerja dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus benar-benar menjadi pemberdaya dan komunitas menjadi pihak yang diberdayakan. Persoalannya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah memahami apa itu pemberdayaan; apakah yang menyebabkan komunitas menjadi tidak berdaya; apakah yang harus diberikan kepada komunitas agar mereka menjadi lebih berdaya; dan apakah akibat (konsekuensi) yang harus ditanggung oleh para pemberdaya dalam keputusannya melakukan upaya pemberdayaan.

Tujuan Dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dan prinsip pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto “2014:202”, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”. Perbaikan Usaha “*Better Business*”, Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*” Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan “Najati dkk, 2005:54”, adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan atau Kemandirian, Berkelanjutan.

Tahapan Dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut “Soekanto, 1987:63” yaitu Tahap Persiapan; Tahapan Pengkajian “*Assessment*”; Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan; Tahap Formulasi Rencana Aksi; Tahap Pelaksanaan Implementasi Program Atau Kegiatan; Tahap Evaluasi; dan Tahap Terminasi. Terdapat beberapa proses pemberdayaan masyarakat, yaitu Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses mem- berikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses mesti- mulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Berikut ini beberapa pendapat tentang tingkat kesejahteraan dan indikator kesejahteraan adalah Tingkat kesejahteraan menurut Sayogo pada tahun 1964, Sayogo, pertama kali memperkenalkan cara pengukuran tingkat kesejahteraan (kemiskinan) dengan menggunakan tingkat pendapatan ekuivalen tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikatornya. Tingkat kesejahteraan menurut Bappenas dalam Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, terpenuhi atau tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tingkat kesejahteraan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan (tingkat kesejahteraan) dengan menggunakan pendekatan konsumsi. Tingkat kesejahteraan menurut TNP2K, mulai tahun 2015 dalam menyusun Basis Data Terpadu Pro- gram Penanganan Fakir Miskin (BDT-PPFM) dilakukan melalui pemeringkatan kesejahteraan dengan metode statistik yang disebut *Proxy-Means Testing* (PMT). Model PMT dibangun berdasarkan data makro yaitu SUSENAS yang secara statistik mencerminkan representasi karakteristik rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Indonesia dan mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Kajian

Lokasi kajian meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Setu; (2) Kecamatan Bojongmangu; (3) Kecamatan Tambelang; dan (4) Kecamatan Muaragembong. Kajian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, mulai pertengahan September 2020 hingga pertengahan Oktober 2020.

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknis Pengumpulan Data

Kajian yang menggunakan metode deskriptif ini menggunakan dua jenis data, pertama adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para nara sumber ter pilih (purposive sampling) yang berasal dari pemerintah dan tokoh masyarakat terkait informasi tentang kegiatan dan perilaku masyarakat di wilayahnya. Kedua adalah data sekunder berupa data kualitatif maupun kuantitatif terkait materi

Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)

kajian yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen resmi yang telah maupun belum di publikasikan.

Teknis Analisis Kajian

Data-data yang telah diperoleh dilakukan analisis yang meliputi:

Analisis Kondisi Wilayah Kajian dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap data-data yang di himpun. Deskripsi kajian/ analisa di lengkapi dengan penyajian tabel maupun grafik. Analisis Tipikasi Masyarakat di Wilayah Kajian didasarkan pada aspek ekonomi dan sosial/budaya masyarakat dengan menggunakan teknik skor pada faktor-faktor penyusun tipikasi berikut:

- ❑ Mengetahui mata pencaharian utama:

Penentuan mata pencaharian di dasar kan pada persentase penduduk yang bekerja di sektor primer, sekunder, maupun tersier terhadap seluruh penduduk, dengan penentuan skor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

Kriteria dan Skor Mata Pencaharian.

No	Kriteria	Skor
1	55% atau lebih penduduk bermata pencaharian pokok di sektor primer	1
2	55% atau lebih penduduk bermata pencaharian pokok di sektor sekunder	2
3	55% atau lebih penduduk bermata pencaharian pokok di sektor tersier	3

- ❑ Mengetahui tingkat pendidikan:

Tingkat pendidikan diperhitungkan dari persentase penduduk yang tamat SMP hingga setingkat Perguruan Tinggi terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang di hitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat pendidikan} = \frac{\sum \text{penduduk usia 15 th ke atas yg tamat SMP ke atas}}{\sum \text{penduduk usia 15 th ke atas}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan di atas digunakan untuk menentukan kategori dan skor dengan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Kategori dan Skor Tingkat Pendidikan.

No	Kategori	Skor
1	Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah	1
2	Penduduk dengan tingkat pendidikan sedang	2
3	Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi	3

Penentuan interval nilai pada ke tiga kategori didasarkan pada hasil perhitungan (persentase) tingkat pendidikan dengan menggunakan rumus:

$$C = \frac{Xn - X}{k}$$

Keterangan:

Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)

- C = interval kelas (kategori)
 X_n = nilai tertinggi (persentase tertinggi)
 X_i = nilai terendah (persentase terendah)
 k = banyak kelas (kategori)

☐ Mengetahui tingkat kesejahteraan:

Penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan analisis kuantitatif berdasarkan selisih jumlah seluruh penduduk dengan jumlah individu dengan status kesejahteraan sampai dengan 40% terendah. dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk, yang di hitung menggunakan rumus berikut

$$\text{Proporsi tingkat kesejahteraan} = \frac{\sum \text{penduduk} - \sum \text{individu Desil 1-4}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan di atas digunakan untuk menentukan kategori dan skor dengan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Kategori dan Skor Tingkat Kesejahteraan.

No	Kategori	Skor
1	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah	1
2	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan sedang	2
3	Penduduk dengan tingkat kesejahteraan tinggi	3

Penentuan interval nilai pada ke tiga kategori didasarkan pada hasil perhitungan (persentase) tingkat kesejahteraan dengan menggunakan rumus yang sama sebagaimana penentuan interval pada tingkat pendidikan.

☐ Mengetahui kegiatan masyarakat:

Kegiatan masyarakat didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber terkait kegiatan masyarakat sehari-hari. Dengan kriteria dan skor untuk kegiatan masyarakat adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.

Kriteria dan Skor Kegiatan Masyarakat

No	Kategori	Skor
1	Sebagian besar waktu tidak hanya untuk bekerja, masih memiliki banyak waktu luang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan organisasi masyarakat warga.	1
2	Sebagian besar waktu untuk bekerja, tetapi masih menyempatkan waktu luang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan organisasi masyarakat warga meski tidak terlalu aktif.	2
3	Sebagian besar waktu hanya untuk bekerja, hampir tidak punya waktu untuk kegiatan kemasyarakatan maupun tergabung organisasi.	3

☐ Mengetahui perilaku masyarakat:

Perilaku masyarakat didasarkan pada dua hal yaitu:

- (1) Tingkat gotong royong masyarakat yang diperhitungkan berdasarkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Adapun tingkatan dalam bergotong royong sebagaimana tabel berikut.
- (2) Perilaku masyarakat ketika membutuhkan biaya, baik untuk kebutuhan modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak, tingkatan perilaku ekonomi masyarakat adalah sebagaimana tabel berikut.

Penilaian perilaku masyarakat (perilaku dalam bergotong royong dan perilaku ekonomi) yaitu dengan menjumlahkan semua skor untuk selanjutnya di kategorikan dalam kategori 1, kategori 2, dan kategori 3, dengan interval nilai pada ke-tiga kategori menggunakan rumus sebagaimana penentuan nilai interval kategori pada tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Tipikasi masyarakat merupakan gabungan penilaian (pemberian skor) dari ke lima faktor/unsur penyusun tipikasi di atas dengan kategori tipikasi menggunakan ketentuan berikut: Kategori Tipikasi Masyarakat. Jumlah skor antara 5 – 8 Tipikasi Masyarakat tradisional, Jumlah skor antara 9 – 12 Tipikasi Masyarakat transisi, dan Jumlah skor di atas 12 Tipikasi Masyarakat maju.

- (3) Kesimpulan dan Rumusan Rekomendasi. Hasil seluruh analisa/kajian di atas di kolaborasi secara deskriptif logis dalam kesimpulan terkait pemberdayaan masyarakat pedesaan di wilayah kajian. Selanjutnya dirumuskan rekomendasi dan policy brief bagi pengembangan pemberdayaan di wilayah kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian dan Pembahasan.

Hasil penghitungan terhadap unsur/faktor penyusun tipikasi masyarakat (yaitu unsur mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, kegiatan masyarakat, dan perilaku masyarakat) diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.

Hasil Penilaian (skor) Unsur Tipikasi Masyarakat

Unsur Penyusun Tipikasi	Nama Kecamatan			
	Setu	Bojong mangu	Tabelang	Muara gembong
Mata Pencaharian	2	1	1	1
Tingkat Pendidikan	3	1	1	2
Tingkat Kesejahteraan	3	2	1	1
Kegiatan Masyarakat	3	2	2	2
Perilaku Masyarakat	3	2	1	1
Jumlah	14	8	6	7

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2020.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 14 dan nilai terendah adalah 6, sehingga interval untuk 3 kategori tipikasi masyarakat yaitu masyarakat tradisional, masyarakat transisi, dan masyarakat berkembang (maju) adalah 3. Dengan demikian dapat dilakukan klasifikasi tipikasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika total skor unsur tipikasi masyarakat antara 6 sampai 9, maka masuk ke dalam tipikasi masyarakat tradisional;
- Jika total skor unsur tipikasi masyarakat antara 10 sampai 12, maka masuk ke dalam tipikasi masyarakat transisi; dan
- Jika total skor unsur tipikasi masyarakat di atas 12, maka masuk ke dalam tipikasi masyarakat berkembang.

Dengan klasifikasi tersebut di atas dan berdasarkan penghitungan hasil penilaian unsur tipikasi masyarakat (tabel 17) maka diperoleh tipikasi masyarakat di masing-masing kecamatan terhadap kecamatan lainnya pada lokasi kajian yang di rangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
Tipikasi Masyarakat di Wilayah Kajian Kabupaten Bekasi

Nama Kecamatan	Total Skor	Tipologi Masyarakat
1. Kecamatan Setu	14	Masyarakat berkembang
2. Kecamatan Bojongmangu	8	Masyarakat tradisional
3. Kecamatan Tambelang	6	Masyarakat tradisional
4. Kecamatan Muaragembong	7	Masyarakat tradisional

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa analisa tipikasi masyarakat di wilayah kajian di Kabupaten Bekasi menghasilkan 2 tipologi masyarakat yaitu 1 kecamatan termasuk tipologi masyarakat berkembang, dan 3 kecamatan masuk ke dalam tipologi masyarakat tradisional. Berikut ini uraian kecamatan-kecamatan di wilayah kajian di Kabupaten Bekasi berdasarkan tipologi masyarakatnya.

(1) **Tipologi Masyarakat Berkembang:**

Kecamatan-kecamatan di wilayah kajian yang termasuk tipologi masyarakat berkembang adalah Kecamatan Setu, karena berdasar analisa unsur penyusun tipologinya menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen penduduknya bermata pencaharian di sektor sekunder, penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SMP sederajat hingga setingkat perguruan tinggi mencapai 62,23 persen sehingga masuk dalam kategori tinggi, persentase penduduk/individu dengan kondisi kesejahteraan 40% terendah sebesar 18,31 persen yang artinya tingkat kesejahteraan penduduk (individu dengan kondisi kesejahteraan di atas 40% terendah) adalah sebesar 81,69 persen sehingga masuk dalam kategori tinggi. Sementara itu kegiatan sebagian besar masyarakatnya adalah untuk bekerja sehingga budaya gotong royong membangun desa sudah hampir tidak terlihat, pelaksanaannya lebih banyak diserahkan pada pihak ketiga, meskipun demikian, di sela-sela waktu luang masih

sempat untuk mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal mengatasi kesulitan ekonomi sudah mulai menggunakan jasa perbankan.

(2) Tipologi Masyarakat Tradisionil:

Kecamatan di wilayah kajian yang termasuk tipologi masyarakat tradisional adalah Kecamatan Bojongmangu, Tambelang, dan Kecamatan Muaragembong. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki faktor yang berbeda-beda yang menyebabkan termasuk dalam klasifikasi masyarakat tradisional. Kecamatan Bojongmangu masuk ke dalam tipologi masyarakat tradisional karena lebih dari 55 persen penduduk bekerja di sektor primer, tingkat pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas termasuk kategori rendah, tingkat kesejahteraan penduduk termasuk kategori sedang. Kegiatan masyarakat di samping bekerja masih memiliki banyak waktu luang untuk bergabung dalam organisasi masyarakat warga dan terlibat kegiatan pembangunan desa, hanya saja dalam pelaksanaan ada imbalan atau berbayar. Dalam mengatasi kesulitan ekonomi masih mengandalkan jasa rentenir.

Kecamatan Tambelang termasuk dalam tipologi masyarakat tradisional karena lebih dari 55 persen penduduk bekerja di sektor primer, tingkat pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas termasuk kategori rendah, tingkat kesejahteraan penduduk termasuk kategori rendah. Kegiatan masyarakat di samping bekerja masih memiliki banyak waktu luang untuk bergabung dalam organisasi masyarakat warga dan terlibat kegiatan pembangunan desa, hanya saja dalam pelaksanaan ada imbalan atau berbayar. Dalam mengatasi kesulitan ekonomi masih mengandalkan jasa rentenir.

Sementara itu, Kecamatan Muaragembong termasuk dalam tipologi masyarakat tradisional karena lebih dari 55 persen penduduk bekerja di sektor primer, tingkat pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas termasuk kategori sedang, tingkat kesejahteraan penduduk termasuk kategori rendah. Kegiatan masyarakat di samping bekerja masih memiliki banyak waktu luang untuk bergabung dalam organisasi masyarakat warga dan terlibat kegiatan pembangunan desa, hanya saja dalam pelaksanaan ada imbalan atau berbayar. Dalam mengatasi kesulitan ekonomi masih mengandalkan jasa rentenir.

Contoh Bentuk Pemberdayaan Masyarakat.

Pengetahuan tentang tipologi masyarakat sangat diperlukan dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Berikut ini beberapa contoh bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada.

- (1) Penduduk di Pedukuhan Kadisoka, Desa Puwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta awalnya adalah petani tradisional yang mengelola lahan persawahan berbentuk minapadi seluas ± 70.000 m². Dalam perjalanan waktu model persawahan sedemikian, justru tidak membawa dampak perekonomian yang signifikan, malahan peternakan ikan yang hanya merupakan usaha sampingan berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan kontur spasial lingkungan, curah hujan yang melimpah dan didukung dengan topografi berdataran rendah bersuhu yang memungkinkan perikanan darat berkembang dengan pesat. Maka mulai tahun 2016 terjadilah proses perpindahan

*Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan
Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)*

profesi dari penduduk Kadisoka yang secara tradisional merupakan petani tradisional berubah menjadi nelayan ikan darat. Maka seiring dengan berjalannya waktu terjadilah proses perpindahan profesi dari penduduk Kadisoka yang secara tradisional merupakan petani tradisional berubah menjadi nelayan ikan darat. Bermula hanya beberapa orang penduduk yang akhir ini telah menarik minat banyak penduduk Kadisoka untuk berkecimpung dalam bidang perikanan darat, di tambah lagi dengan respon pasar yang cepat dan dengan semakin meningkatnya permintaan ikan dari Pedukuhan Kadisoka ini.

Persoalan pun hadir yakni munculnya kemiskinan modal dan infrastruktur dalam pengembangan perikanan darat dalam memenuhi tuntutan pasar. Pada tahun 2019 PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan lapangan usaha utama penduduk Pedukuhan Kadisoka hadir. Tidak hanya menjawab permasalahan kemiskinan modal, tetapi juga pendampingan kemitraan yang ada antara pasar, pemerintah, maupun masyarakat. PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang ada di Pedukuhan Kadisoka murni atas inisiatif warga untuk mengembangkan perikanan darat dan untuk memperluas pekerjaan bagi generasi muda yang ada sehingga mampu mengurangi ketergantungan perekonomian dengan Kota Yogyakarta. Pemberdayaan masyarakat di Pedukuhan Kadisoka ini sempat menjadi percontohan nasional di Pulau Jawa.

- (2) Pemberdayaan petani tradisional Desa Krebet Kabupaten Bantul Yogyakarta melalui kerajinan batik ukir. Kehadiran industri kerajinan batik kayu di Desa Krebet memberikan dampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Secara umum, masyarakat mendapat manfaat dari pengembangan Industri Kerajinan Batik Kayu, terutama bagi para pengrajin. Sebelumnya, masyarakat hanya bergantung kepada hasil pertanian yang lambat laun mengalami penurunan karena faktor alam. Namun setelah ada *gallery* batik kayu ada, masyarakat banyak yang menjadi pengrajin, walaupun hanya dalam satu tahap produksi. Kondisi ini menjadikan masyarakat lebih tenang dan nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang, terbukti nama Batik Kayu semakin terkenal hingga ke mancanegara.

Pengembangan potensi masyarakat dalam Industri Kerajinan Batik Kayu diwujudkan melalui pengembangan *skill/* keterampilan dalam tahap produksi dan kemampuan dalam pendampingan kepada para pengunjung. Sebelum melakukan pekerjaan di *gallery* batik, pihak pengelola melakukan identifikasi terkait bakat dan kemampuan dalam setiap tahap yang akan diambil. Masyarakat yang memiliki kemampuan akan ditempatkan sesuai dengan tahapan tersebut, misalkan tahap pengukiran. Melalui aktivitas yang rutin masyarakat akan semakin mahir dalam bidang yang mereka minati dan diharapkan dapat menjadi ilmu untuk mendirikan industri baru secara mandiri.

Selain potensi dari segi keterampilan, masyarakat juga dituntut untuk mampu mendampingi dan memberikan arahan kepada pengunjung. Pendampingan dilakukan sebagai metode pemasaran Industri Batik Kayu Krebet. Misalnya, mengadakan *event* yang tujuan utamanya untuk membangun *brand experience* kepada pengunjung untuk mengetahui proses pembuatan dari awal hingga akhir.

Metode ini merupakan bentuk pemberdayaan mental masyarakat dalam menghadapi dan melakukan pendampingan kepada klien atau pengunjung. Tentunya akan bermanfaat untuk menambah keilmuan sebagai seorang pendamping.

- (3) *Grameen Bank* adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh, didirikan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1974. Bank ini memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral*. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola *Grameen Bank* ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia (kebanyakan di negara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola *Grameen Bank* ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan.

Terdapat enam prinsip yang digunakan oleh Muhammad Yunus dalam mengembangkan *Grameen Bank*. Pertama, bahwa kemiskinan tidak dibuat oleh si miskin itu sendiri, namun institusi dan kebijakan yang melingkupi mereka. Kedua, amal bukanlah solusi untuk kemiskinan sebab hal ini akan menyebabkan adanya ketergantungan. Ketiga, sistem *Grameen Bank* tidak percaya bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan orang miskin dan yang lainnya. Hanya saja, orang miskin tidak mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya. Keempat, semakin sedikit materi yang dimiliki, maka mereka akan semakin diprioritaskan. Prinsip ini berkebalikan dengan prinsip bank pada umumnya, bahwa semakin banyak materi yang di investasikan nasabah maka semakin besar keuntungan nasabah. Kelima, *Grameen Bank* percaya bahwa orang miskin pasti akan mengembalikan pinjamannya, meskipun terkadang melebihi waktu jatuh tempo. Keenam, perempuan lebih diprioritaskan sebab *Grameen Bank* yakin bahwa perempuan memiliki *long-term vision* dan siap membawa perubahan pada hidup mereka dan keluarganya.

Tiga praktek pemberdayaan di atas merupakan contoh pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan tipologi masyarakat. Secara umum pengertian pemberdayaan merupakan proses memberikan daya kepada yang belum memiliki daya (Tumpal: 2003), tetapi dengan sebatas pemahaman tersebut tanpa dilengkapi dengan pengetahuan tentang karakteristik/tipologi masyarakat beserta kebutuhannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang berkepentingan dalam kerja pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya menyediakan 1 model pemberdayaan untuk diimplementasikan pada seluruh wilayahnya, tetapi beberapa model/*skim* pemberdayaan sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil kajian dan analisis terhadap kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian di Kabupaten Bekasi maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil kajian wilayah menunjukkan bahwa:
 - a) Kecamatan Setu:

Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)

- merupakan daerah pertanian lahan kering dan tanaman tahunan yang mengandalkan curah hujan untuk mengairi lahan;
 - berdekatan dengan kawasan industri di Kecamatan Cikarang Barat sehingga berkembang menjadi wilayah permukiman, meski tidak terlalu luas sudah terdapat kawasan industri;
 - fasilitas pendidikan cukup banyak tersedia mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga Perguruan Tinggi, demikian juga dengan lembaga pendidikan/pelatihan keterampilan;
 - fasilitas kesehatan cukup banyak tersedia mulai dari rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, balai pengobatan, puskesmas hingga apotek hingga toko obat/jamu;
 - fasilitas ekonomi cukup banyak tersedia mulai dari pasar, kompleks pertokoan, mini market, warung kelontong, termasuk bank pemerintah maupun swasta.
- b) Kecamatan Bojongmangu:
- merupakan daerah pertanian lahan kering dan sebagian lagi berupa kawasan tanaman tahunan;
 - berdekatan dengan kawasan industri di Kecamatan Cikarang Pusat, meski tidak terlalu luas sudah terdapat kawasan industri;
 - fasilitas pendidikan tersedia mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA/SMK sederajat;
 - fasilitas kesehatan hanya terdapat 4 balai pengobatan yang terkonsentrasi di satu kecamatan, puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing 1 unit;
 - fasilitas ekonomi cukup banyak dijumpai warung kelontong yang tersebar di seluruh desa, hanya ada 1 pasar permanen, sudah berdiri 1 unit BPR.
- c) Kecamatan Tambelang:
- sebagian besar merupakan daerah pertanian lahan basah;
 - berdekatan dengan kawasan pengembangan industri di Kecamatan Cibitung;
 - fasilitas pendidikan cukup tersedia untuk jenjang SD sederajat, dengan jumlah terbatas untuk lembaga pendidikan SMP dan SMA/SMK sederajat ;
 - fasilitas kesehatan cukup tersedia balai pengobatan, hanya tersedia 1 puskesmas dengan fasilitas rawat inap;
 - fasilitas ekonomi terdapat kompleks pertokoan dan mini market, belum berdiri bank.
- d) Kecamatan Muaragembong:
- merupakan daerah pesisir dengan lahan terbesar merupakan kawasan lindung, jauh dari pusat perekonomian/industri;
 - fasilitas pendidikan cukup tersedia untuk jenjang SD sederajat hingga SMA/SMK sederajat ;
 - fasilitas kesehatan tersedia 7 unit balai pengobatan dan 1 unit puskesmas dengan fasilitas rawat inap;
 - fasilitas ekonomi banyak berdiri warung kelontong di seluruh desa, terdapat 1 mini market, dan sudah berdiri bank pemerintah maupun swasta.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Setu merupakan kecamatan yang lebih berkembang dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya.

- 2) Hasil kajian tipologi (tipe dan karakteristik) masyarakat menunjukkan bahwa Kecamatan Setu memiliki tipologi masyarakat berkembang, Kecamatan Bojongmangu, Tambelang, dan Kecamatan Muaragembong memiliki tipologi masyarakat tradisional dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kecamatan Setu, mayoritas penduduk dengan pekerjaan pokok di sektor sekunder dan tersier, penduduk usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SMP ke atas lebih dari 60%, tingkat kesejahteraan tergolong tinggi, mayoritas penduduk memiliki mobilitas tinggi untuk bekerja, semangat gotong royong hampir tidak ada, telah menggunakan jasa bank untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun ekonomi rumah tangga.
 - b) Kecamatan Bojongmangu, mayoritas penduduk dengan pekerjaan pokok di sektor primer, sebagian di sektor sekunder, penduduk usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SMP ke atas kurang dari 60%, tingkat kesejahteraan tergolong sedang, mobilitas kerja tidak terlalu tinggi, semangat gotong royong masih terbangun, masih menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun ekonomi rumah tangga.
 - c) Kecamatan Tambelang, mayoritas penduduk dengan pekerjaan pokok di sektor primer, penduduk usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SMP ke atas kurang dari 60%, tingkat kesejahteraan tergolong rendah, mobilitas kerja tidak terlalu tinggi, semangat gotong royong masih terbangun, masih menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun ekonomi rumah tangga.
 - d) Kecamatan Muaragembong, mayoritas penduduk dengan pekerjaan pokok di sektor primer, penduduk usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan SMP ke atas kurang dari 60%, tingkat kesejahteraan tergolong rendah, mobilitas kerja tidak terlalu tinggi, semangat gotong royong masih terbangun meski dalam beberapa hal (misalnya gotong royong untuk pembangunan desa) berharap imbalan, masih menggunakan jasa rentenir dengan alasan lebih mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun ekonomi rumah tangga dibandingkan jasa bank (yang telah tersedia).

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil kajian tipikasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan di Kabupaten Bekasi, maka implikasinya adalah:

- 1) Dengan adanya dua variasi yaitu tipologi masyarakat berkembang dan masyarakat tradisional, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyiapkan program pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya mempersiapkan satu pola/model pemberdayaan masyarakat untuk di implementasikan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi mempersiapkan beberapa pola/model pemberdayaan masyarakat sesuai dengan topologi masing-masing masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)

- 2) dengan melihat perkembangan wilayah (lokasi kajian) khususnya di Kecamatan Setu dan kemudian Kecamatan Bojongmangu diperlukan pola pemberdayaan khusus dalam hal kesiapan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan daerah pertanian menjadi daerah pengembangan industri oleh Kecamatan di sekitarnya.

Rekomendasi

- 1) Melakukan inovasi program pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan dan strategi program.
- 2) Rata-rata lebih dari 45% penduduk usia kerja perempuan di lokasi kajian merupakan penduduk idle (mengurus rumah tangga dan lain-lain) yang memiliki banyak kesempatan berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan desa, di luar urusan
- 3) Domestik rumah tangga. Sehingga dibutuhkan pemberdayaan khusus perempuan, dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama, diantara pemerintah dan masyarakat serta perempuan itu sendiri pada khususnya. Diperlukan suatu kepekaan dan kesadaran gender, utamanya dalam pembuat kebijakan/perencana pembangunan. Saran untuk peningkatan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan perempuan desa. misalnya; pelatihan keterampilan yang mendatangkan praktisi, studi banding ke desa lain dan lain sebagainya. mengembangkan produk unggulan desa berbasis kegiatan perempuan desa.meningkatkan peluang akses sumber-sumber keuangan khususnya dana untuk modal usaha dari berbagai sumber APBDes, maupun sumber dana lain, misalnya dengan kegiatan simpan-pinjam khusus perempuan. Membentuk jaringan kerjasama dengan organisasi perempuan lain.Memberikan motivasi secara berkelanjutan supaya perempuan desa aktif dan percaya diri dalam pengambilan keputusan desa. Meningkatkan peluang keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa yang mendasarkan pada kualitas dan kuantitas perempuan desa.
- 4) Mengembangkan peran CSR (Corporate Social Responsibility) yang selama ini lebih banyak memiliki program-program charity, dengan lebih mengedepankan pengembangan maupun dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat.
- 5) Melakukan kajian lanjutan mengenai tipologi masyarakat dengan faktor atau unsur- unsur lain yang belum tercantum dalam kajian ini, misalnya terhadap wilayah perkotaan dan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. S. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Tahun 2019. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

*Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan
Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2020. Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2020. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2020. Kecamatan Bojongmangu Dalam Angka 2020. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2020. Kecamatan Muaragembong Dalam Angka 2020. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2020. Kecamatan Setu Dalam Angka 2020. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2020. Kecamatan Tambelang Dalam Angka 2020. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat, Agustus 2019. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.

Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES.

Dini Utami, Ajeng. 2019. Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa. Temanggung: Literasi Desa Mandiri.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. 2006. Penyusunan Tipologi Pedesaan dalam Rangka Pengembangan Keberdayaan Masyarakat di Daerah Perbatasan. Jakarta: Kementerian PDT.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2017. Penelitian tentang Profil dan Pemetaan Potensi Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Desa Mandiri Sejahtera, Rangkuman Hasil Pemetaan. Jakarta: Kemensos.

Kurniawan, Adji. 2017. Tipologi dan Tugas Desa-Desa di Indonesia mulai 2018. dalam Berdesa.com di akses 15 Agustus 2020.

Leibo SU, Jefta. 1995. Sosiologi Pedesaan : Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda. Yogyakarta: Andi Offset.

*Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan di Kawasan
Pedesaan Kabupaten Bekasi (Erna Haryanti)*

- Maulana, Mirza. 2017. Model Transisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Strategi Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kerajinan Batik di Desa Kreet Kabupaten Bantul. Surakarta: Jurnal UIN di akses 12 Oktober 2020.
- Raharjo Jati, Wasisto. 2013. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis PNPM Mandiri di Yogyakarta. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, LIPI.
- Rahayu, Ning. 2017. Muhammad Yunus: Pejuang Pemberantas Kemiskinan Melalui Grameen Bank. Warta Ekonomi.co.id di akses 12 Oktober 2020.
- Setiawan, Samhis. 2020. Karakteristik, Ciri dan Sifat Pedesaan Beserta Penjelasannya. dalam gurupendidikan.co.id di akses 15 Agustus 2020.
- Simanjuntak, M. Tumpal. 2003. Pengertian Dasar dan Perspektif Pemberdayaan. Surabaya: Modul Pelatihan Fasilitator P2KP KMW-SWK 8 Jawa Timur.
- Simanjuntak, M. Tumpal. 2003. Prinsip-Prinsip Community Development. Surabaya: Modul Pelatihan Fasilitator P2KP KMW-SWK 8 Jawa Timur.
- Situmorang, S. H. (2010). Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2020. Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nila Cakra.
- Wachidah, Nurul. 2012. Analisis Tipologi dan Strategi Pengembangan Desa- Desa Pesisir Kabupaten Kendal. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

<http://www.bekasikab.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.tnp2k.go.id>